

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chomzah, A. A. *Hukum Pertanahan Seri I*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2002
- G.Kertasapoetra, R. K. *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara. 1985
- Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. 2007
- Hartanto, J. A. *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: Laksbang Juisticia. 2013
- Hutagalung, A. S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. 2005
- Kurniati, D. N. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrasi Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama. 2016
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Murad, R. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni. 1991
- Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008
- Manullang, E. F. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016
- Mertokusumo, S. (Karunika Universitas Terbuka). *Hukum dan Politik Agraria*. 1998
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020
- Napitupulu, D. R. *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya)*. Jakarta: UKI Press. 2022
- Napitupulu, D.R. *Hukum Pertanahan*, Jakarta: BMP UKI. 2022
- Parlindungan, A. *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan tata cara Pejabat Pembuatan Akta Tanah*. Bandung: Alumni. 1978
- Prodjodikoro, W. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1983
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010
- Soerodjo, I. *Kepastian Hukum Hak atas tanah di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Arkola Surabaya. 2002

- Setiyono, D. K. *Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Redaksi Raih Asa Sukses. 2009
- Soemardjono, M. S. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. 1998
- Santoso, U. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2010
- Santoso, U. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Sumardjono, M. S. *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Jakarta: Kompas. 2001
- Soerodjo, I. *Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola. 2003
- Sutedi, A. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Soemaryono. *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pramedya Pustaka. 1999
- Syarief, E. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2012
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin. 2005
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014
- Tjitrosoedibio, R. S. *Kamus Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. 1993
- Tehupeiory, A. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012
- Tehupeiory, A. *Pengakuan Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Pada Abad Digital*. Jakarta: UKI Press. 2018
- Tehupeiory, A. *Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan*. 1528. 2023
- Wowor, F. A. *Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta. 2014
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016

B. Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UUPA No. 5 Tahun 1960. LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No. 28, TLN No. 6630.

Putusan Mahkamah Agung No.1040 K/PDT/2021.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

C. Jurnal

Berliana, J. Analisis Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah Pada sertipikatTanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. 2023

Dewi, N. M. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*. 2021

Handayani, S. *Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik Dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. 2015

Indratama, S. P. Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. *Jurnal Imu Hukum*. 2020

- Nurkristia, D. Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Suara Hukum*. 2021
- Purba, H. Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan. *Jurnal Law Review*, 167.
- Suhaidi. Aspek Yuridis Atas Perlindungan Lingkungan Laut dari Pencemaran Pada Wilayah Laut yang Berbeda di Suatu Negara. *Jurnal Equality*, Volume 10, Nomor 2. 2023
- Susilo, F. R. Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.). *Adil Indonesia Journal Vol. 4*. 2023
- Sumarto. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh BPN RI*. Jakarta: Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri. 2012
- Simamora, Y. (*Penafsiran Hakim Tentang Keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian Sebagai Penyelenggara Negara Dan Penegak Hukum (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/PID.PRAP/2015)*). 2016
- Tedjo, A. Fungsi Buku Letter C Desa Dalam Kaitannya Dengan Buku Kerawangan Desa Sebagai Landasan Yuridis Dan Alat Bukti Awal Atas Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 2017
- Yulianto, M. Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan. *Jurnal Mimbar Keadilan*. 2023